Anang Muftiadi: Kerangka Kerja Logis Permudah Merancang Program dan Proyek

Menyusun Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Analysis – LFA) akan sangat memudahkan dalam merancang program dan proyek. Umumnya kerangka kerja disusun mulai dari yang sifatnya sederhana atau umum hingga yang spesifik. Namun, Dr. R. Anang Muftiadi, SE., Msi berpendapat kerangka kerja logis bisa disusun dari menentukan goal atau tujuan terlebih dahulu. "Tujuan akan tercapai apabila ada output yang bisa dimanfaatkan. Pola ini bisa diterapkan untuk kerangka kerja apapun," ujar dosen Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Unpad dalam kuliah tamu di Program Studi Perencanaan Wilayah Kota (PWK) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, kampus I, Senin (1/4/19).

Anang Muftiadi membeberkan, untuk membuat rencana, langkah-langkahnya dimulai dari input, process, output, dan goal. Ia pun berbagi pengalaman membangun sektor air bersih dengan penerapan kerangka kerja logis. Goal-nya adalah penduduk yang sehat dan produktif, sedangkan output-nya adalah air bersih. Prosesnya dengan membangun instalasi (intake, pengelolaan, distribusi), memproduksi, dan mengelola. Imput-nya dari air baku, listrik, bahan kimia, bahan bangunan, pompa, dan pipa, SDM serta biaya operasional.

"Pada prosesnya, diantara output dan goal terdapat outcome yang akan mempengarui benefit, dan impact. Dalam pendekatan

sistem ada yang bisa dikontrol oleh organisasi, dan ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Input sampai output bisa dimonitoring, namun mulai outcome harus dievaluasi," jelasnya.

Dosen yang pernah mengajar di PWK ITN Malang tahun 1995-1997 ini juga menjelaskan mengenai spektrum pemanfaatan logical framework. Ada empat kuadran yakni, public sector, private sector, empiric, dan academic. "Kalau anda-anda sekalian sukses studi dan melanjutkan ke S-2, maka stimulan akan memperkaya karena kalian mempunyai frame. LFA ini bisa menjadi alat untuk menentukan bagaimana berfikir logis dalam konteks akademis," tegasnya. (me/humas)

Marsel Y.W. Petu, Alumni ITN Malang Kembali Dilantik jadi Bupati Ende

Ir. Marsel Y.W. Petu – Drs. Djafar Achmad, resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur NTT, Minggu (7/4/2019). Pelantikan tersebut secara resmi menandai periode kepemimpinan Ir. Marsel Y.W. Petu dan Djafar Achmad, untuk memimpin Kabupaten Ende periode 2019-2024.

Dilantiknya Ir. Marsel Y.W. Petu menjadi Bupati Ende kali kedua menjadi kebanggaan tersendiri bagi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Pasalnya Marsel Petu merupakan alumni Teknik Arsitektur ITN Malang angkatan tahun 1983. Sebagai alumni yang berhasil membangun daerahnya, Marsel Petu tidak lupa akan almamaternya kampus biru. Terakhir mengunjungi ITN Malang saat ia diundang untuk memberi sambutan pada Wisuda ITN Malang ke-56 Periode II Tahun 2016.

Dicukil dari laman itnmalangnews.id, saat mengunjungi ITN Malang Marsel Petu mengajak ITN untuk bekerjasama membangun Kabupaten Ende. Menurutnya, daerah tempat pengasingan Sukarno tersebut membutuhkan orang-orang hebat dari ITN Malang untuk membangun. “ITN Malang harus menjadi tim teknologi dalam pembangunan Kabupaten Ende,” ujarnya, Sabtu (24/9/16).

Sementara itu, diberitakan beritalima.com, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ende sebelumnya sudah menjabat sejak tanggal 7 April 2014. Selama masa kepemimpinan periode tahun 2014 – 2019 tersebut, berbagai program dan visi misi strategi sudah dijalankan dengan aktif, rukun, aman, dan damai. “Dari semua pembangunan yang kami kerjakan bertujuan untuk kepentingan daerah, dan masyarakat Kabupaten Ende. Jadi, tidak hanya sekedar bisa dilihat saja, tetapi sungguh – sungguh dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ende,” kata Bupati Ende terpilih, Marsel Petu, yang didampingi wakilnya, Djafar Achmad saat jumpa pers di Hotel Sasando, Jumat (5/4/19) malam. (me/humas)

Parkir Vertikal Alternatif Parkir di Kota Malang

Rencana Pemerintah Kota Malang untuk membangun parkir vertikal (vertical parking) menjadi perbincangan hangat dalam Idjen Talk, City Guide FM, Rabu (10/4/19). Rencana ini dikuatkan pernyataan Diah Ayu Kusuma Dewi, Asisten 2, Pemkab Malang. Menurutnya, sudah ada tiga negara yakni Jerman, Cina, dan Singapura yang menyambut baik rencana tersebut. “Wali Kota Malang menggagas parkir vertikal, namun perkembangannya masih dalam kajian. Ajakan kerjasama perhitungkan dengan melihat budget yang ada,” terang Diah. Bahkan menurut Diah rencana pembangunan parkir vertikal sudah masuk dalam RBJMB dan rencana tata ruang kota.

Parkir vertikal memang menjadi salah satu solusi bagi Pemkot Malang. Mengingat lahan parkir di Kota Malang yang terbatas, sedangkan jumlah kendaraan semakin hari semakin bertambah. Parkir yang sering meluber ke badan jalan memicu kemacetan dibeberapa ruas jalan. Apalagi status Kota Malang sebagai pusat bisnis juga memiliki destinasi wisata kampung tematik. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan.

Sementara, parkir yang diterapkan selama ini masih menggunakan parkir sistem seri atau pararel di pinggir-pinggir jalan. Hal ini ikut disoroti oleh Dr.Ir. Nusa Sebayang, MT pakar transportasi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Menurutnya, Kota Malang lahan parkirnya sangat terbatas. Parkir dengan sistem horison (pararel/seri) sangat sulit diterapkan dengan lahan sempit sedangkan jumlah kendaraan banyak. “Cocoknya memang parkir vertikal, tapi akan berdampak pada cost (biaya) yang lebih mahal. Memang perlu ada kajian panjang untuk mewujudkan ini (parkir vertikal),” ujarnya, menanggapi rencana Pemkot Malang.

Menurut Nusa, parkir vertikal memang membutuhkan kajian, mulai studi kelayakan, penyusunan DED (Detail Engineering Design), keamanan dan kekuatan rancangan. Setelah beroperasi, masih ada analisis dampak lalu lintas. Jarak perjalanan antara tempat parkir dan obyek tujuan, prediksi jenis kendaraan yang akan parkir juga harus dikaji. “Harus memetakan kawasan yang nantinya bisa dilayani oleh tempat parkir itu sendiri. Ini semua dianalisis, jadi akan diketahui berapa space yang diperlukan. Kalau gedung maka berapa tingkat yang dibutuhkan dan yang diperbolehkan. Mengingat harus memperhitungkan tingkat keamanannya juga,” tambah alumnus doktoral UB ini.

Kajianpun menurut Nusa tidak sesederhana itu, kelayakan ekonomi juga harus diperhitungkan. Perlu diukur juga jumlah pengunjung perhari, serta biaya maintenance. Ini bisa disimulasikan, menghitung berapa tarif yang harus dikenakan agar investasi tetap berjalan. Tak kalah penting juga adalah kesadaran masyarakat harus turut dibangun.

Nusa menambahkan, wacana parkir vertikal menjadi hal baru dan cocok diterapkan bagi Kota Malang. Mengingat potensi kunjungan wisata ke Kota Malang sangat tinggi, terlebih lagi Kota Malang memiliki kawasan heritage. “Masyarakat juga jangan hanya berkomentar ini (tarif parkir) mahal. Coba bersama-sama kita lihat bagaimana proses membangun serta benefit-nya. Kita harus rasional, kalau semua didemo maka kita tidak akan maju. Ide ini mari kita dukung sehingga Malang menjadi lebih baik lagi,” ujarnya, imbas dari banyaknya pengunjung pun nantinya akan

meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Malang. (me/humas)